

PERGESERAN PERAN KYAI DALAM POLITIK DI BANTEN ERA ORDE BARU DAN REFORMASI

ABDUL HAMID

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
doelha@yahoo.com

Abstract

Kyai is one of traditional leaders in Banten. The political role of kyai in Banten has risen and fell. From colonial collapsed to Indonesian Revolt 1945, the leadership of kyai had increased in the peak performance. In 1945 until 1950, all of the Bupati in Banten were positioned by kyai. Since that time to now, in all of dimensions, the leadership of kyai has decreased. In New Order era, many kyais were organized as supported organization of ruling party. It was mutualism relation, ruling party got mass supports and kyai got material support for himself and pesantren. Impact of this strategy was increasing of charisma, influence, and trust. On the other hand, some kyais got oppression because of their independences and critics to government. In reformasi era, kyai had been fragmented in many political powers, but still as supporting actor not as the main one. To fulfill their needs, both for their selves and for pesantren, some kyais has done pragmatically and depended on others. This met with politician or government purposes to get religious legitimacy. The mix of political and economic weakness made kyai failed to made reformasi era as an opportunity to get back their ultimate role in politics.

Keywords: *kyai, political role, New Order, Reformation era, Banten.*

Abstract

Kyai merupakan salah satu pemimpin tradisional di Banten. Peran politik kyai di Banten sudah mengalami pasang surut. Sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan tahun 1945, kepemimpinan kyai berada pada masa keemasannya. Dari tahun 1945-1950, semua posisi bupati di Banten diisi oleh seorang kyai. Sejak saat itu hingga sekarang, kepemimpinan kyai mengalami penurunan dalam semua dimensi. Pada masa Orde Baru, banyak kyai diorganisir untuk mendukung partai penguasa. Hal ini sebenarnya merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara kyai dan partai penguasa di mana partai penguasa memperoleh dukungan massa dengan keterlibatan kyai

sedangkan kyai mendapatkan dukungan material dari pemerintah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pesantrennya. Dampak dari strategi ini adalah peningkatan kharisma dan pengaruh kyai, dan kepercayaan masyarakat terhadap kyai. Di sisi lain, beberapa kyai mendapat tekanan karena sikap independen dan kritik mereka terhadap pemerintah. Pada masa reformasi, kyai terpecah dalam banyak kekuasaan politik, tetapi masih sebagai aktor pendukung, bukan sebagai aktor utama. Untuk memenuhi kebutuhan mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun pesantrennya, beberapa kyai melakukan sesuatu yang pragmatis dan bergantung pada yang lain. Hal ini tentu saja sesuai dengan tujuan dan keinginan para politisi dan pemerintah yang ingin memperoleh legitimasi keagamaan. Lemahnya kekuatan politik dan ekonomi para kyai membuat mereka gagal menjadikan era reformasi sebagai sebuah peluang untuk merebut kembali peran utama mereka dalam politik.

Kata Kunci: *kyai, political role, Orde Baru, era Reformasi, Banten.*

Latar Belakang

Banten adalah satu wilayah yang berada di ujung barat pulau Jawa. Walaupun Provinsi Banten baru terbentuk pada tahun 2000, masyarakat Banten memiliki kesatuan politik di masa lalu sebagai sebuah kesultanan dalam waktu yang cukup lama, yakni 1526-1828 M. Di era kemerdekaan sampai menjadi provinsi, Banten merupakan sebuah Karesidenan, bagian dari Jawa Barat. Provinsi Banten kini terdiri dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Islam adalah agama terpenting di Banten dengan jumlah pemeluknya sebesar 95,89%. Pemeluk agama lainnya: Katolik 1,03%, Protestan 0,22%, Hindu 0,22%, Budha 1,15% dan sisanya memeluk agama lokal.¹ Selain itu, masyarakat muslim di Banten juga dianggap lebih taat menjalankan ajaran agamanya dibandingkan masyarakat muslim di tempat lain di Jawa. Van Bruinessen melaporkan bahwa:

The populations of Banten were more faithful than other Javanese in the observance of such religious obligations as the fast during Ramadhan and the payment of zakat. Moreover, unlike elsewhere the payment of zakat in Banten served to strengthen independent ulama—the kyai or guru—as

against the official religious functionaries who usually administered (and enforced) zakat (Van Bruinessen, 1995: 165).²

Melihat komposisi di atas, maka bisa dipahami jika kepemimpinan pemimpin agama Islam menempati posisi yang amat penting. Secara kultural, pemimpin agama di Banten disebut kyai. Kyai biasanya memimpin sebuah pondok pesantren.

Tulisan singkat ini memaparkan pergeseran peran kyai dalam politik di Banten. Fokus tulisan ini adalah bagaimana peran politik kyai di Banten di era Orde Baru dan setelahnya. Namun, untuk menjelaskan bagaimana pergeseran terjadi, paparan akan diawali dengan puncak peranan kyai dalam dunia politik, baik di era kolonial maupun kepemimpinan formal kyai dalam pemerintahan daerah di Banten pada awal Republik Indonesia berdiri.

Kepemimpinan Kyai dalam Pemberontakan di Banten Era Kolonial

Kepemimpinan kyai di Banten ditunjukkan oleh peran besarnya dalam berbagai peristiwa bersejarah di Banten. Pada 1888, pemberontakan terpenting di Banten yang masyhur dengan pemberontakan petani Banten atau Geger Cilegon, dipimpin oleh Kyai Haji Wasid, Haji Abdul Karim (Ki Agung) dan Kyai Haji Tubagus Ismail.

Pemberontakan yang dipicu semangat anti Barat didapatkan dari para kyai dan haji yang pulang menunaikan ibadah haji dari Mekkah. Mereka tak hanya melaksanakan ritual haji tapi juga mempelajari pengetahuan agama Islam dari ahli-ahli agama Islam yang disebut guru *djawab*³. Karakter konservatif dan fundamentalis dari para guru *djawab* dan disiplin yang kuat, menimbulkan semangat anti Barat dan semangat kebangkitan Islam. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai nasionalisme Islam.⁴

Peristiwa bersejarah lain adalah pemberontakan komunis di Banten pada 1926 yang uniknya dipimpin oleh para kyai seperti Kyai Achmad Chatib, bekas ketua Sarekat Islam (SI) Labuan, Kyai Alipan, Tubagus Hilman, Haji Emed, dan para kyai dari banyak desa di sekitar Karesidenan Banten.

Setelah pemberontakan berakhir, 4 orang digantung, 9 orang dipenjara seumur hidup, 900 dikirim ke penjara, 99 orang dibuang ke Digul.⁵ Sebelas dari 99 tahanan Digul adalah kyai, 27 orang dari

mereka bergelar haji dan 17 orang pernah tinggal di Mekkah lebih dari 2 tahun.

Revolusi dan Pemerintahan Kyai di Banten

Pada akhir bulan Agustus 1945, melihat perkembangan situasi dan jabatan residen yang kosong setelah ditinggal Yuki Yoshii, Residen Banten dan wakilnya, Rd. Tirtasujatna, atas usaha para pemuda, diselenggarakan pertemuan di antara para tokoh masyarakat Banten untuk menangani masalah pemerintah daerah. Pertemuan secara aklamasi memilih K.H. Tb. Achmad Chatib sebagai Residen Banten yang menangani pemerintahan sipil. Untuk itu, mereka mendesak Pemerintah Pusat agar segera mengangkatnya dan untuk menangani urusan militer diserahkan kepada K.H. Sjam'un.

Bagi Pemerintah Pusat nampaknya tidak ada pilihan lain kecuali mengabulkan permintaan tersebut dan pada tanggal 2 September 1945, lewat radiogram, K.H. Achmad Chatib diangkat sebagai Residen Banten.⁶

Di masa inilah, atas desakan masyarakat dan Dewan Rakyat yang dipimpin Ce Mamat, dilaksanakan pergantian dalam pemerintahan di mana hampir semua pejabat pemerintahan formal dari level karesidenan sampai kecamatan dipimpin oleh kyai. Pergantian pejabat oleh para kyai tersebut tidak hanya pada pejabat pamong praja, tapi juga di tubuh militer, kepolisian dan kejaksaan.

Karena persoalan politik, salah satunya tudingan hendak memulihkan Kesultanan Banten dan juga tuntutan profesionalisme, maka perlahan pemerintahan para kyai kembali digantikan oleh pamong praja. Namun era singkat pemerintahan para kyai ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kyai di Banten. K.H. Achmad Chatib sendiri kepemimpinannya berakhir Desember 1949 setelah terjadinya pemberontakan Tentara Rakyat dan ditempatkan di Jawa Barat, sedangkan (Acting) Residen Banten kemudian diisi M. Kafrawi dari Surabaya.

Di era setelah itu sampai pertengahan 1960-an peran kyai bukannya betul-betul berhenti, namun tak dominan seperti era sebelumnya. Kyai tersebar di berbagai partai, terutama partai-partai Islam dan beberapa dari mereka juga duduk di parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah.

Korporatisasi Kyai dan Pemilu pada Orde Baru: Kasus Kabupaten Serang⁷

Menyadari kuatnya peran kyai sebagai pemimpin masyarakat Banten, pemerintah Orde Baru sejak tahun 1967 telah berusaha mendekati para kyai dalam upaya untuk mensukseskan kebijakan pemerintah Orde Baru. Melihat besarnya pengaruh kyai di Banten dalam menggerakkan umat Islam, muncul gagasan dari pemerintah daerah (terutama dari aparat militer) untuk mengkooptasi para kyai ke dalam jajaran pendukung Golkar.

Untuk mewujudkan gagasan ini, aparat pemerintah daerah menyadari bahwa mereka perlu membicarakannya kepada pimpinan militer dan pemerintah yang lebih tinggi. Gagasan ini disambut dengan penuh antusias oleh Gubernur Solichin G.P dan Panglima Kodam Siliwangi A.T. Witono. Akhirnya dipertemukanlah kedua pejabat tersebut dengan K.H. Mahmud, seorang kyai yang disegani oleh masyarakat Banten. Pertemuan ini berlanjut dengan datangnya Pangkowi II (Jawa-Madura) Letjen. Surono untuk menemui K.H. Mahmud dan para kyai Banten.

Pertemuan ini belum menghasilkan seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah Orde Baru, yaitu agar para kyai masuk ke Golkar. Akhirnya pada pertemuan antara Presiden Soeharto dengan K.H. Mahmud di Batukuwung, Kyai Mahmud dan para kyai menyatakan diri sebagai pendukung Golkar. Maka pada tanggal 3 Mei 1970 berdirilah organisasi Satkar Ulama, dengan Ketua Umum K.H. Mahmud.⁸

Turun langsungnya Presiden Soeharto untuk “menjinakkan” para kyai menunjukkan betapa posisi kyai dianggap sentral di Banten. Nampaknya, pemerintah pusat memahami betul bahwa sejarah masyarakat Banten lekat dengan kepemimpinan kyai. Merangkul kyai berarti mempermudah dalam menancapkan kekuasaan semakin dalam ke masyarakat Banten.

Pembentukan Satkar Ulama merupakan bagian dari strategi korporatisasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui Golkar. Kelompok dalam masyarakat dikotak-kotakkan untuk kemudian mempermudah dikuasai dan membuat aspirasi memiliki jalur resmi yang mudah dikontrol. Tak hanya kyai di Banten yang “dijinakkan” dengan strategi ini, kelompok kultural lain di Banten yaitu jawara juga dikuasai, dikontrol dan kemudian menjadi pilar Orde Baru di Banten melalui pembentukan Satuan Karya Jawara yang kemudian

berganti nama menjadi Persatuan Pendekar Pesilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).

Menjelang Pemilu 1971, para kyai yang tergabung dalam Satkar Ulama tidak hanya melakukan kampanye terbatas dalam pesantren yang mereka pimpin, tetapi juga terjun ke pengajian-pengajian di mesjid-mesjid agar umat Islam di Banten memilih Golkar. Di lain pihak jajaran pemerintah daerah melakukan upaya untuk mempengaruhi penduduk sampai pada tingkat pedesaan. Karena itulah kemudian Golkar mampu mendapatkan suara terbanyak sebesar 49,83% dalam pemilu 1971, mengalahkan partai-partai yang lebih senior seperti PNI, Parmusi (eks Masyumi) atau PSII di Serang.

Setelah fusi partai tahun 1973 jumlah peserta pemilu hanya 3 partai. Partai-partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti bergabung menjadi PPP dan partai nasionalis serta Kristen yaitu Parkindo, Murba, IPKI dan Partai Katolik bergabung menjadi PDI. Dalam menghadapi pemilu 1977, para pimpinan PPP melakukan konsolidasi habis-habisan. Para kyai PPP meningkatkan pengajian baik di pesantrennya maupun ke daerah lain. Di dalam pengajian maupun khotbah Jum'at, mereka menegaskan identitas PPP sebagai partai Islam. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan sentimen keagamaan. Hal ini diperkuat dengan digunakannya Kakbah sebagai lambang partai. Akibatnya pada Pemilu 1977 PPP menang di Serang dengan perolehan suara 54,97%. Golkar berada di posisi kedua dengan 42,52% suara, sedangkan PDI menjadi juru kunci dengan suara 2,52%. Namun hal ini ditebus dengan banyaknya pendukung PPP (termasuk para kyai) yang dibawa ke Kodim untuk diinterogasi atau ditahan.⁹

Dalam sudut pandang aktor politik lokal, strategi merekrut kyai untuk bergabung ke Golkar direncanakan berdasarkan evaluasi terhadap kegagalan Golkar di Kabupaten Serang pada Pemilu 1977. Serangkaian evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Golkar Kabupaten Serang, Suwandi, menyimpulkan bahwa kegagalan Golkar diakibatkan oleh tidak dimilikinya akar yang kuat terhadap kelompok Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Banten. Kesimpulan ini membuat dihasilkannya strategi untuk merekrut kyai ke dalam tubuh Golkar dan dibentuknya sayap Islam di dalam tubuh Golkar. Muncullah kebijakan untuk mengisi anggota Dewan Penasehat di tingkat Kabupaten sebanyak 30% berasal dari unsur kyai. Sedangkan di tingkat kecamatan dan desa, kyai dan ustadz setempat diupayakan untuk menjadi pengurus. Di pihak lain, Golkar juga melakukan strategi massa

mengambang dengan melarang partai politik (baca: PPP dan PDI) untuk memiliki kepengurusan di tingkat desa.

Selain itu, banyak kyai berpengaruh diposisikan sebagai “*vote getters*”. *Vote getters* adalah istilah Golkar bagi tokoh masyarakat yang dijadikan calon legislatif nomor jadi, tapi berkomitmen untuk mundur ketika penetapan anggota legislatif. Seorang *vote getter* menandatangani kontrak dengan Golkar untuk mundur walaupun ia seharusnya terpilih menjadi anggota DPRD. Berbagai strategi tersebut mulai dilaksanakan dari Serang dan berkembang ke daerah-daerah lain, terutama di Banten. Efek strategi tersebut adalah kemenangan Golkar terhadap PPP pada Pemilu 1982 dengan perolehan suara sebanyak 48,57%, sedangkan suara PPP turun menjadi 47,98% dan PDI sebesar 3,45%.¹⁰

Namun, kemenangan tipis tidak membuat Golkar puas. Menyadari bahwa kemenangan Golkar dikarenakan banyaknya peran kalangan Islam, maka akomodasi terhadap tokoh Islam dan kyai semakin digencarkan. Pengerahan Satkar Ulama dilakukan besar-besaran setelah Munas I Satkar Ulama 1985. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan dan fasilitas memenangkan pemilu kepada para kyai Golkar. Strategi ini didukung dengan calon DPRD Serang dari Golkar pada pemilu 1987 yang 100% beragama Islam, termasuk dari kalangan militer.¹¹

Sementara itu, sejak tahun 1978, di tubuh PPP terjadi perpecahan antar unsur Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimin Indonesia (MI). Klimaksnya adalah ketika NU keluar dari PPP dan dari arena politik formal pada tahun 1984, yaitu dengan ditetapkannya kebijakan kembali ke khittah 1926 (NU sebagai Jam’iyyah) (Samsuddin, 2001: 52). Konflik ini kemudian menjadi penggembosan yang dilakukan oleh kalangan NU kepada PPP yang tak hanya di tingkat pusat tapi juga terjadi di tingkat lokal yang dilakukan pimpinan NU Cabang Serang.

Dinamika lain yang terjadi adalah semakin kerasnya sikap militer menimbulkan ketakutan di kalangan aktivis muslim. Di tingkat nasional misalnya, terjadi peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan ratusan aktivis Islam oleh militer pada 12 September 1984. Akibatnya kampanye PPP tidak segegar pemilu sebelumnya dan mengakibatkan penurunan suara PPP.

Namun senjata pamungkas yang betul-betul membuat PPP suaranya melorot adalah politik desimbolisasi Islam dari PPP. Dengan

UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas yang mengharuskan pencantuman Pancasila sebagai asas tunggal. Pada Pemilu 1987 PPP juga tidak bisa menggunakan simbol Kakbah yang lekat dengan masyarakat muslim namun menggunakan simbol Bintang.

Desimbolisasi ini membuat PPP kehilangan identitasnya sebagai Partai Islam, karena dengan demikian semua partai politik memiliki kesamaan asas, yakni Pancasila dan menggunakan lambang salah satu gambar di perisai Pancasila burung garuda. Secara praktis para juru kampanye di lapangan kesulitan untuk membuat identitas pembeda antara PPP dengan Golkar dan PDIP. Apalagi banyak kyai yang kemudian beralih menjadi pendukung Golkar.

Berbagai problematika ini membuat PPP di Serang hanya mendapatkan 29,19% suara, sedangkan Golkar mendominasi dengan perolehan 60,35% suara. Bisa dikatakan setelah era ini, Golkar kemudian mendominasi perpolitikan di Banten. Golkar melaju meninggalkan PPP dan PDI yang kemudian hanya menjadi pengembira dalam dunia politik.

Tabel 5
Perbandingan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 1977, 1982 dan 1988 di Kabupaten Serang (Dalam persen)

Organisasi Peserta Pemilu	1977	1982	1987
PPP	54,97	47,98	29,19
Golkar	42,52	48,57	60,35
PDI	2,52	3,45	10,45

Sumber: Sudiati Artati, 1988

Bagi para kyai, pengakomodasian oleh Golkar memberikan keuntungan politik, keamanan dan ekonomi baik untuk dirinya sendiri maupun pesantren. Keuntungan yang paling penting adalah dukungan ekonomi untuk menjamin keberlangsungan dan perkembangan pondok pesantren.¹²

Nasib Kyai Non Kooperatif

Di sisi lain, kyai yang dianggap tidak mendukung Golkar mendapatkan tekanan dari pemerintahan Orde Baru maupun militer. Para kyai yang mendapatkan tekanan akhirnya menghindari dunia politik dan memfokuskan diri pada aktivitas mengajar. Ada juga yang

memilih hijrah, seperti Kyai Damanhuri dari Cihideung Pandeglang yang hijrah ke Kota Makkah.

Adik ipar Kyai Damanhuri, yaitu Kyai Dimiyati merupakan salah satu kyai terbesar di Banten. Para santri dan tokoh masyarakat memanggilnya dengan sebutan Abuya. Abuya Dimiyati memimpin sebuah pesantren di Cidahu Pandeglang dengan para santri yang berasal dari berbagai penjuru Banten, Jakarta, Bogor dan Sumatera.

Beliau dianggap sebagai kyai paling senior, sehingga bukan hanya mengajar para santri, tapi juga memberikan pengajaran mingguan kepada para tokoh agama dan kyai dari pesantren-pesantren seluruh Banten. Kitab-kitab yang dibahas adalah kitab-kitab yang tebal dan cukup sulit untuk dipahami seperti *Ihyā' 'Ulūmuddīn* dan *al-Mustasyfā* yang keduanya ditulis oleh al-Gazālī. Abuya Dimiyati merupakan Mursyid Tarekat Syadziliyyah di Indonesia. Beliau dipercaya oleh para santri dan masyarakat memiliki ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu kedigjayaan.¹³

Di era Orde Baru, Abuya Dimiyati pernah ditangkap dan dipenjarakan menjelang Pemilu 1977. Penangkapan Abuya Dimiyati dikarenakan pernyataan Abuya Dimiyati yang dianggap menyerang pemerintah dan Golkar. Pada hari Jum'at 11 Maret 1977, Abuya Dimiyati sebelum khutbah Jum'at mengatakan kepada kepala desa setempat, supaya masyarakatnya jangan ditakut-takuti dan diintimidasi oleh kepentingan salah satu kontestan pemilu, dengan berbagai ancaman, salah satunya dengan pernyataan bahwa "*Golkar itu Pemerintah*". Abuya Dimiyati mengungkapkan bahwa "*Pemerintah adalah R.I. dan bukan Golkar*."¹⁴

Situasi memanas, dan pada tanggal 14 Maret 1977 Abuya Dimiyati ditangkap oleh aparat kepolisian. Penangkapan ini membuat situasi Kota Pandeglang menjadi tegang dan hampir menimbulkan kerusuhan. Santri dan para jawara bersepakat untuk mengeluarkan Abuya Dimiyati secara paksa dari penjara. Namun pecahnya kerusuhan batal terjadi setelah Abuya Dimiyati mengirimkan pesan kepada pemimpin jawara yang hendak mengeluarkan Abuya Dimiyati yaitu Jaro Kamid dan Achmad Waluh melalui sipir penjara. Pesannya adalah "*Saya di dalam bui (tahanan) sudah tenang, jangan mengadakan tindakan apapun*." Abuya kemudian divonis enam bulan penjara.

Aspek mitos dan mistis nampak dominan dalam penceritaan peristiwa ini. Dikabarkan Abuya Dimiyati, walaupun berada di penjara, di saat yang bersamaan seringkali terlihat berada di pesantren Cidahu.

Banyak juga yang melihat Abuya Dimyati di kediamannya, di pasar Pandeglang atau melaksanakan salat di Mesjid Agung Pandeglang. Padahal Abuya Dimyati tidak pernah meninggalkan ruang tahanannya. Selain itu, para penegak hukum yang terlibat dalam kasus penangkapan Abuya Dimyati diberitakan mengalami berbagai musibah. Hakim yang memvonis menjadi bisu, serta polisi yang ikut menangkap Abuya Dimyati menjadi gila.

Tak hanya menimpa kyai, Mathla'ul Anwar sebagai organisasi Islam di mana banyak kyai bergabung di dalamnya juga mengalami berbagai tekanan.¹⁵ Di bawah kepemimpinan Nafsirin Hadi, MA memiliki hubungan yang amat dekat dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Selain itu, MA juga menunjukkan sikap ketidaksetujuannya dengan penerapan asas tunggal Pancasila. Hal ini membuat MA memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah.

Nafsirin Hadi merupakan ketua Mathla'ul Anwar pada Mukhtar ke XII di Jakarta tahun 1975. Sebelumnya ia merupakan Pjs. Ketua Umum menggantikan K.H.M Muslim yang meninggal dunia pada tahun 1974. K.H.M. Muslim terpilih dalam Mukhtar Luar Biasa di Bandung menggantikan K.H. E. Uwes Abu Bakar yang meninggal dunia pada tahun 1973.

Buruknya hubungan dengan pemerintah membuat Mukhtar Mathla'ul Anwar yang sedianya akan diselenggarakan di Lampung batal dilaksanakan karena tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Lampung. Hal ini membuat perpecahan di kalangan internal pimpinan MA. Bagi pemerintah ini adalah kesempatan emas untuk melakukan intervensi dan menggantikan kepemimpinan Nafsirin Hadi dengan pemimpin yang lebih kooperatif.

Pada Mukhtar tahun 1985 di Menes, kelompok pro pemerintah di bawah dukungan penuh dari Letnan Jenderal Alamsjah Ratuperwiranegara berhasil menggusur kepemimpinan Nafsirin Hadi sebagai pucuk pimpinan MA. Hal ini terjadi setelah Nafsirin Hadi gagal menghadiri Kongres MA akibat manuver militer. Nafsirin Hadi tak hanya diberhentikan sebagai Ketua Umum Pemimpin Besar Mathla'ul Anwar, namun juga dari keanggotaannya di Mathla'ul Anwar. Posisinya kemudian digantikan oleh Kyai Burhani yang pro pemerintah dengan Irsjad Djuwaeli sebagai Sekretaris Jendral.¹⁶

Peristiwa ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah dan Golkar untuk menancapkan pengaruhnya di Mathla'ul Anwar. Hal ini ditandai

dengan diterimanya Pancasila sebagai asas Mathla'ul Anwar.¹⁷ Selain itu, MA mengadopsi beberapa prinsip yang selama ini diterapkan di Golkar seperti kuatnya posisi Dewan Pembina yang dipimpin oleh Letnan Jenderal (Purn) Alamsyah Ratuperwiranegara.¹⁸

Pada Kongres Mathla'ul Anwar tahun 1991 yang dibuka oleh Wakil Presiden Soedharmono, Irsjad Djuwaeli terpilih sebagai Pimpinan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar. Di masa kepemimpinannya, Mathla'ul Anwar menyatakan diri mendukung Golkar. Sejak tahun 1992, Irsjad Djuwaeli menjadi anggota DPR RI dari Golkar.

Kedudukan dan Peran Politik Kyai di Era Reformasi

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, liberalisasi politik terjadi di Indonesia. Kebebasan dalam berpolitik membuat bermunculannya partai politik seperti jamur di musim hujan. Para kyai terfragmentasi ke dalam berbagai partai politik, sebagian lagi menarik diri dari dunia politik. Beberapa kyai bertahan di Golkar seperti Kyai Wahab Afif atau Kyai Salman Al Faris.

Di pentas politik lokal Banten, muncul juga beberapa kyai yang di pentas politik seperti Kyai Aminuddin Ibrahim dan Kyai Muhtadi Dimiyati di PKB. Selain itu, muncul juga gerakan radikal Islam di Banten, salah satunya adalah Front Hizbullah. Front Hizbullah didirikan oleh K.H. Cecep Bustomi dari Pandeglang. Kelompok ini berkeinginan menegakkan syariat Islam dan menentang segala bentuk kemaksiatan.

Namun cara yang ditempuh Front Hizbullah adalah cara yang radikal, yaitu mengerahkan anggota-anggotanya untuk merusak atau mengganggu berbagai kegiatan yang dianggap mengandung unsur maksiat. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai hiburan rakyat yang seringkali diadakan dalam berbagai perayaan seperti perkawinan dan khitanan. Aktivitas perusakan ini berlangsung dari tahun 1999 sampai tahun 2000.

Pada tanggal 23 Juli 2000, Front Hizbullah membubarkan hiburan pongdut (jaipong dangdut) yang diselenggarakan seorang warga di Desa Tambilik Kecamatan Petir Serang. Pongdut tersebut merupakan hiburan dalam perayaan khitanan seorang warga. Sekitar lima ratus anggota Front Hizbullah datang dan membubarkan acara serta merusak berbagai peralatan. Seorang Prajurit Grup 1 Kopassus yang berada di lokasi sempat membubarkan massa dengan tembakan

ke udara dua kali, namun ia malah dikeroyok massa sampai tewas. Dua orang juga terluka parah dalam huru-hara ini.

Sehari setelah peristiwa itu, Kyai Cecep Bustomi diundang oleh Wakil Komandan Grup 1 Kopassus di Serang. Sepulang dari pertemuan di Serang, di depan Pasar Rawu, mobil Kyai Cecep Bustomi dihentikan oleh empat motor dan langsung diberondong senapan otomatis oleh empat orang bertopeng. Sampai sekarang kematian Kyai Cecep Bustomi masih menjadi misteri karena tidak pernah diproses secara hukum. Namun banyak pihak menduga pembunuhan ini dilatarbelakangi pembalasan dendam akibat peristiwa sehari sebelumnya.¹⁹ Peristiwa ini kemudian melemahkan bahkan mengubur kebesaran Front Hizbullah yang selama ini begitu ditakuti.

Peristiwa kekerasan lain berdasar sentimen agama juga menimpa sebuah media lokal di Banten. Kyai Aminuddin, pengurus PKB mengerahkan massa dan mengepung media Harian Banten. Hal ini akibat foto dalam koran tersebut yang memuat demonstran sedang membawa karikatur Abdurrahman Wahid (Presiden waktu itu).²⁰ Persoalan ini akhirnya diselesaikan melalui campur tangan Pjs. Gubernur Banten Hakamuddin Jamal.²¹

Kedua peristiwa ini tak terlepas dari berbagai peristiwa radikalisme agama yang muncul di Indonesia di era pasca Soeharto. Umat Islam gampang disulut emosinya karena terjadinya peristiwa konflik antar agama di Ambon. Namun ternyata radikalisme berbalut agama nampaknya sulit menjadi komoditas yang diminati di Banten. Nyaris tak ada peristiwa konflik berbalut agama yang lain di Banten selain peristiwa di atas.

Menguatnya Jawa dan Melemahnya Kyai

Di era reformasi, tepatnya setelah Banten menjadi provinsi, kekuatan kyai yang dilemahkan oleh pemerintah Orde Baru semakin terdominasi oleh kekuatan jawara. Jawa yang melibatkan diri dalam perpolitikan Banten adalah jawara pengusaha yang dibesarkan oleh rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru mengorganisir para jawara dengan membentuk organisasi Satuan Karya (Satkar) Jawa pada tahun 1971. Satkar Jawa dipimpin oleh H. Tubagus Chasan Sohib. Pembentukan Satkar Jawa ini dilaksanakan di Batukuwung Serang, dihadiri oleh Danrem 064/ Maulana Yusuf Banten, Kol. Inf. Anwar Padmawijaya, Pangdam VI/ Siliwangi, Gubernur Jawa Barat, Solichin GP, dan beberapa pimpinan nasional.

Pembentukan Satkar Jawara hampir berbarengan dengan pembentukan Satkar Ulama, organisasi Ulama Golongan Karya yang bertujuan merangkul para kyai. Satkar Jawara pun memang didesain sebagai organisasi otonom di bawah Golkar untuk menggalang potensi jawara di Banten yang memang merupakan pemimpin informal di Banten. Dua kekuatan, ulama (kyai) dan jawara dirangkul oleh Golkar. Akhir tahun 1973, Satkar Jawara berubah nama menjadi Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI).

Semenjak Banten jadi provinsi, bahkan dalam pembentukan Provinsi Banten, Chasan Sochib sebagai tokoh jawara tampil dominan, padahal gagasan pembentukan Provinsi Banten awalnya berasal dari para kyai pada awal tahun 1999. Pada hari Jum'at, 5 Februari 1998 Presiden Habibie berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Iman Pandeglang yang dipimpin K.H. Aminuddin Ibrahim. Dalam pertemuan itu, K.H. Aminudin Ibrahim mengusulkan agar wilayah eks Keresidenan Banten ditingkatkan menjadi Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, Presiden BJ. Habibie tidak menolak usulan itu, hanya menyatakan bahwa usulan itu harus melalui mekanisme konstitusional.²²

Namun pada proses selanjutnya bola sepertinya dikuasai oleh kelompok jawara dan para pengusaha. Peran Kyai dalam proses terbentuknya Provinsi Banten nampak tidak terlalu menonjol. Dominasi kelompok jawara terlihat dalam berbagai peristiwa, seperti proses pengisian anggota DPRD Banten dan proses pemilihan Gubernur Banten tahun 2001 yang mampu menempatkan anak Chasan Sochib, Atut Chosiyah menjadi Wakil Gubernur²³.

Bahkan dominasi jawara mampu membuatnya menguasai organisasi para kyai seperti terjadi pada Satkar Ulama. Chasan Sochib memenangkan pemilihan Ketua dalam Kongres Pimpinan Pusat Satkar Ulama. Chasan yang bukan Kyai mengalahkan Kyai Salman Al Faris melalui pertarungan dua putaran.²⁴ Situasi ini menunjukkan kondisi bahwa organisasi para ulama tidak dipimpin oleh seorang kyai, tapi seorang jawara.

Kyai dan Dinamika Politik Lokal Banten: Kasus Pilkada Pandeglang dan Pilkada Banten

Secara umum, kyai di Banten di era reformasi terjebak sebagai penggembira dalam dunia politik. Kyai menjadi pemeran pembantu dengan figur utama para politisi non kyai. Hal ini terlihat dalam

pemilihan Bupati Pandeglang 2005, posisi kyai amat menonjol sebagai tim sukses kandidat *Incumbent*, Dimiyati Natakusumah. Padahal, *Incumbent* sempat diguncang skandal perselingkuhan dengan siswi SMA. SDK, siswi SMA tersebut membuat pengakuan bahwa ia beberapa kali melakukan perbuatan layaknya suami-istri dengan sang Bupati di sebuah hotel di Jakarta.²⁵

Anehnya, kyai di Pandeglang justru membela habis-habisan bupati. Ketua MUI Pandeglang, K.H. Datep, bahkan mengeluarkan fatwa untuk memilih Dimiyati dalam Pemilihan Bupati Pandeglang. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa keluarnya fatwa tersebut dibalas dengan imbalan sejumlah uang dari Dimiyati bagi ketua MUI setiap kecamatan.

Akibatnya muncullah gelombang demonstrasi yang menuntut MUI agar bersikap netral dan menuntut K.H. Datep diberhentikan sebagai Ketua MUI. Demonstrasi ini digerakkan Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, LAKPESDAM NU Pandeglang dan Gerakan Pemuda Anshor. Akhirnya, K.H. Datep dinonaktifkan sementara sebagai ketua MUI Kabupaten Pandeglang oleh MUI Banten.²⁶

Namun para kyai tidak surut dengan berbagai tudingan dan tetap mendukung Dimiyati. Hal ini nampaknya didorong oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh bupati kepada tokoh-tokoh kyai, selain karena bupati Pandeglang juga menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten.

Dukungan yang diberikan terlihat dari dominannya kyai dalam struktur kepengurusan tim sukses Dimiyati. Hampir semua anggota struktur inti dalam tim sukses diisi oleh kyai, mulai dari tim penasihat sampai semua koordinator wilayah.²⁷

Alasan utama dukungan kyai kepada *incumbent* adalah karena selama menjabat Dimiyati telah memberikan bantuan nyata kepada pesantren dan pengasuhnya. Hal ini diungkapkan K.H. Datep:

"Waktu itu karena masih banya program-program keagamaan yang belum selesai. Maka kalau ganti pejabat, program itu dikhawatirkan hilang atau dari nol lagi. Padahal memperjuangkan itu mati-matian, supaya program keagamaan ini minimal 75% ada realisasinya. Waktu itu belum ada sarana keagamaan, terus bantuan ke guru-guru ngaji, madrasah dan sebagainya. Satu sekolah saja sekarang dapat sumbangan dan insentif bagi guru. Sekarang sudah dua juta tujuh ratus per sekolah, bahkan ada yang tiga jutaan."²⁸

Kyai juga menjadi magnet dalam pemilihan Gubernur Provinsi Banten tahun 2006. Pilkada Gubernur Banten diikuti oleh empat pasangan yaitu pasangan Zulkieflimansyah-Marissa Haque yang diusung PKS dan PSI, Tryana Sam'un-Benjamin Davnie diusung PPP dan PAN, Hj. Rt. Atut Chosiyah-HM Masduki diusung oleh Golkar, PDIP, PBB, PBR dan PDS, serta pasangan Irsyad Djuwaeli-Mas Ahmad Daniri yang diusung oleh PKB dan PD.

Semua calon berupaya menjadikan kyai sebagai simpul massa untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Atut Chosiyah misalnya, menjadikan Satkar Ulama sebagai salah satu unsur pendukung dalam tim sukses. Satkar Ulama sendiri adalah salah satu dari organisasi yang didirikan oleh Golkar dan sekarang dipimpin oleh Chasan Sohib, ayah Atut.

Zulkieflimansyah mendapatkan dukungan dari Forum Komunikasi Kyai dan Tokoh Masyarakat (FKMT) yang dipimpin K.H. Ubung. Trjana Sjam'un mendapatkan dukungan dari beberapa pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten, sedangkan Irsyad Djuwaeli mengandalkan dukungan Mathla'ul Anwar dan Kyai Khozinul Asror dari NU.

Kompetisi dukung-mendukung di kalangan kyai cukup keras. Atut Chosiyah sebagai *incumbent* gagal mendapatkan dukungan bulat dari para kyai. Para kyai yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten menolak memberikan dukungan kepada Atut dan memilih netral, walaupun beberapa pengurus mendukung Zulkifliemasnyah dan Trjana Sjam'un. Hal ini membuat tim sukses Atut mendirikan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Salafi (FSPPS) sebagai tandingan FSPP.

Akibat FSPP tidak mendukung pencalonan Atut, maka ketika Atut terpilih sebagai Gubernur Banten tahun 2007, anggaran untuk pesantren sebesar Rp. 750.000.000/tahun di APBD yang selama ini disalurkan melalui FSPP dihapuskan.²⁹

Dukung-mendukung di kalangan kyai nampaknya menjadi fenomena yang marak dalam Pemilu dan Pilkada. Politisi memanfaatkan kyai untuk mendapatkan dukungan massa, dan kyai memanfaatkan momentum kompetisi politik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Terdapat semacam pertemuan antara *demand* dari *politisi* dan *supply* dari kyai. Bisa dikatakan politisi dan kyai sama-sama aktif saling mendatangi.

Muchtar mandala mengatakan bahwa para kyai datang dan tanpa malu-malu menjanjikan jamaahnya untuk memilih dia asal permohonan bantuan proposalnya dipenuhi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fitron dari PKS dan La Ode Asrarudin dari Golkar. La Ode bahkan mengemukakan bahwa para politisi sendiri sudah pandai berkalkulasi untuk memilih kyai mana yang akan didatangi. Politisi lebih menyukai kyai majelis taklim karena lebih memiliki jamaah yang jelas dengan domisili yang jelas. Kyai pesantren justru kurang dijadikan target karena massanya adalah santri yang sebagian besar tidak memiliki hak pilih dan bisa jadi berdomisili di luar Banten.³⁰

Nampak sekali bagaimana kyai di era pasca Orde Baru tak lagi menjadi *cultural broker*, namun menjadi *political broker*. Hal ini salah satunya diakibatkan karena pesantren dan kyai berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi. Padahal selama ini pondok pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, baik dari segi kurikulum maupun pendanaan. Karena kemandiriannya itu, mereka sering menolak bantuan yang diberikan pemerintah, karena dianggap akan mengintervensi pesantren.

Sumber ekonomi pesantren dan kyai adalah sokongan yang diterima dari para santri yang menuntut ilmu. Karena itu semakin banyak santri yang datang ke suatu pesantren, maka semakin besar juga sumber ekonomi yang didapat oleh kyai dan keluarganya.³¹

Namun kini kemandirian pesantren dan jaminan kehidupan ekonomi keluarga kyai dan para pengasuh pesantren lainnya amat lemah. Para santri yang datang untuk belajar di pesantren, terutama pesantren salafi semakin berkurang. Selain itu, selepas dari pesantren salafi, kehidupan seorang santri menjadi sempit, karena tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh kehidupan modern. Sedangkan pendidikan umum dan modern lebih memberikan jaminan kepada lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Karena itu pragmatisme kyai tampak mengemuka, bahkan seringkali secara amat terbuka.

Pragmatisme ini seringkali terlihat dalam berbagai perhelatan politik. Dalam Pemilu 2004, Kyai K.A., tokoh NU di Kabupaten Pandeglang menganjurkan agar seorang calon anggota DPD mengumpulkan 40 Kyai *kbos* di Pandeglang untuk mendapatkan dukungan politik dalam bentuk istighosah. Saran itu diikuti dengan melakukan berbagai persiapan dan mengundang banyak tokoh.

Namun menjelang pelaksanaan, Kyai K.A. tersebut mensyaratkan sejumlah uang sebagai imbalan bagi dirinya dan bagi 40 Kyai *kebos* tersebut. Hal ini membingungkan karena tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya soal uang. Namun karena undangan sudah disebar dan diberitakan lewat media, maka permintaan uang tersebut dipenuhi setelah proses tawar menawar. Jadilah istighosah tersebut dilaksanakan.

Namun betapa kagetnya sang calon DPD karena sekitar dua minggu kemudian, calon DPD yang lain melakukan istighosah dengan kyai yang sama dalam skala yang lebih besar. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa Kyai K.A. tak lebih dari *event organizer* istighosah untuk mendapatkan uang, bukan betul-betul memberi dukungan politik.³²

Kejadian yang nyaris sama dengan kyai yang sama menimpa Muchtar Mandala sewaktu pencalonannya sebagai bakal calon gubernur Banten. Kyai K.A. yang seringkali datang menyatakan dukungannya ternyata ketahuan mendatangi Kyai Muhtadi Dimiyati bersama calon gubernur lain dan mengajukan rencana untuk memeras dan menghabiskan uang Muchtar Mandala. Kyai K.A. dan calon itu tak tahu bahwa Kyai Muhtadi Dimiyati adalah pendukung utama Muchtar Mandala.³³

Tak jauh berbeda misalnya dalam Pemilu Presiden 2004. Dalam kegiatan Pengarahan Ketua Umum Partai Golkar tentang Koalisi Nasional bagi Pengurus dan Kader Partai Golkar se-Provinsi Banten, di Pandeglang, 21 Agustus 2004, setelah pidato Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum Golkar, K.H. Ujang Rapiudin, seorang pemuka agama setempat, secara blak-blakan bicara soal uang ketika hendak menutup acara dengan doa:

Ayeuna, rakyat mah teu butuh kaos, teu butuh poto, nu penting mah amplop nu dijerona aya duitnya

(rakyat itu tidak butuh kaus, foto, tapi yang terpenting itu amplop yang di dalamnya berisi uang)

Rapiudin meminta kepada tim sukses jangan bodoh dalam membaca keinginan masyarakat. Daripada uang dihambur-hamburkan membagi-bagi kaus, lebih baik bila diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti wayangan, membelikan bola voli, dan lainnya. Yang penting sekarang, tim sukses ulah *balaloon*-nya, jangan bodoh ya, ucapnya dengan logat sunda yang khas.³⁴

Di kalangan pejabat, ada semacam pemahaman untuk memberikan bantuan kepada kyai, di samping menjalin hubungan baik juga agar dalam pekerjaannya tidak mengalami gangguan dan dilindungi oleh kyai dan pengikutnya. Secara berkala misalnya MTG seorang Kepala Dinas di Provinsi Banten memberikan proyek tunjuk langsung (di bawah lima puluh juta) kepada seorang kyai terkenal.³⁵

Kondisi ini sering mendapat tanggapan sinis di kalangan masyarakat *“Di masa lalu pemerintah yang mendekati kyai, tapi sekarang kyai yang mendekati Pemerintah,”* atau *“Di masa lalu, Banten adalah tempat seribu kyai dan sejuta santri, tapi sekarang, kyai mendapatkan sejuta (rupiah dari politisi dan pemerintah) dan santri mendapatkan seribu (rupiah dari kyai)”*. Pada hari Idul Fitri, bukan pejabat pemerintah yang menemui kyai seperti di masa lalu, namun kyai yang mengantri bertemu pejabat untuk mendapatkan amplop.³⁶

Namun apakah dukungan kyai memberikan jaminan dukungan masyarakat. Pada prakteknya, para politisi menyatakan bahwa dukungan kyai tidaklah sebesar yang dibayangkan. Zulkieflimansyah yang mengadakan kegiatan silaturahmi dan deklarasi seribu ulama di Lebak untuk mendukung pencalonannya dalam pemilihan Gubernur 2006 ternyata justru mendapatkan suara yang tidak signifikan di Kabupaten lebak.³⁷ Dukungan Satkar ulama dan FSPPS kepada Atut juga dianggap kurang signifikan dibandingkan dukungan yang diberikan oleh keluarga dan kalangan jawara yang dipimpin oleh Ayah Atut, Chasan Sochib.³⁸

Hal ini bisa jadi dikarenakan para kyai yang datang ke para politisi dan menghadiri kegiatan dukung-mendukung menganggap bahwa kehadirannya adalah sekedar memenuhi undangan dan bukan lantas wajib mendukung. Bahkan tidak jarang para kyai juga memberikan loyalitas ganda kepada beberapa calon sekaligus untuk mendapatkan keuntungan materi sehingga justru membingungkan jamaahnya.³⁹

Menurut Fitron, dukungan kyai lebih penting ke arah upaya membangun pencitraan daripada upaya mendapatkan dukungan riil pemilih. Ia berasumsi di masyarakat Banten, kedekatan dengan kyai memiliki konotasi positif yang mampu mendongkrak citra.

Tak semua kyai terjun dan nyaman berada di dunia politik. Kyai Mufasir di Ciomas adalah salah seorang kyai di Banten yang tidak tertarik politik. Ia hidup mengasingkan diri di pesantrennya di Cipulus, Ciomas Banten. Pesantrennya dihuni tak terlalu banyak santri.

Siapa pun yang hendak menuntut ilmu di sana tidak diperbolehkan memakan apa yang didapatkan dari luar pesantren. Mereka memakan padi yang ditanam di pesantren, memakan ikan yang dipelihara di sana dan memakan buah-buahan yang ditanam di sana seperti pisang atau pepaya.

Kyai dan Politik: Pergeseran Peran Politik

Setelah mengalami peran puncak sebagai pemimpin formal di organisasi pemerintah sipil maupun militer di era revolusi, peran kyai di dunia politik tampak mengalami penurunan. Faktor eksternal dan internal nampaknya membuat kondisi ini terjadi dan membuat peran politik kyai sulit untuk menaik kembali.

Faktor eksternal utama adalah intervensi terhadap independensi kyai yang dilakukan selama Orde Baru. Di era Orde Baru, kyai menghadapi berbagai tekanan dari rezim berkuasa sehingga hanya menghadapi trilema. *Pertama*, bergabung di partai penguasa (baca: Golkar); *kedua*, menjadi oposisi pemerintah; *ketiga*, menarik diri dari dunia politik dan fokus ke dunia pendidikan

Ketiga pilihan di atas tak ada yang betul-betul menguntungkan. Bergabung dengan Golkar berarti mengurangi independensi secara drastis dan membangun ketergantungan terhadap Golkar. Ketergantungan ini terbentang dari persoalan kurikulum sampai ketergantungan ekonomi. Bantuan ekonomi untuk kyai dan pesantren membuat kemandirian yang selama ini dimiliki menjadi hilang. Padahal kyai dahulu dikenal sebagai kalangan berada dengan tanah yang luas.

Bergabung dengan Golkar juga membuat kyai mengalami penurunan kharisma karena kyai dianggap tidak independen lagi oleh masyarakat, menjadi milik satu kelompok tertentu bukan milik semua ummat Islam lagi. Seorang kyai mengistilahkan "*Kyai yang ditinggalkan oleh ummat*"⁴⁰

Nampaknya inilah yang diinginkan oleh rezim Orde Baru dengan strategi korporasinya. Rezim orde baru memahami kekuatan kyai terletak pada kharismanya, maka inilah yang diambil oleh Golkar dengan mengorganisasikan kyai kedalam berbagai organisasi korporatis seperti Satkar Ulama.

Menjadi oposisi jelas bukanlah pilihan yang menguntungkan. Penahanan Abuya Dimiyati di Pandeglang misalnya, menunjukkan bahwa penguasa orde baru tak berkompromi terhadap kyai yang dianggap tak mau berkolaborasi dengan pemerintah. Hal ini juga

ditunjukkan oleh para kyai PPP yang ditahan di Kodim di masa kampanye Pemilu 1987.

Pada akhirnya pilihan ke-3, yaitu fokus ke dunia pendidikan menjadi salah satu pilihan utama. Kyai di Banten, jauh sebelum Orde Baru, yaitu sejak dianggap "gagal" dalam memegang tampuk pimpinan formal di Banten memang kembali ke dunia pendidikan. Hal ini berlanjut di era Orde Baru, di mana kyai yang tak ingin terjebak konflik pro-kontra pemerintah memilih mengabdikan diri di dunia pendidikan.

Namun pendidikan pesantren juga mengalami tekanan dari dunia pendidikan modern. Pesantren, terutama pesantren salafi dianggap tidak mampu berkompetisi dengan pendidikan modern. Pendidikan pesantren yang berfokus pada pendidikan agama dianggap tidak memadai untuk memberikan bekal menghadapi dunia nyata. Para lulusan pesantren acapkali gagap dalam menghadapi dunia kerja.

Persoalan ini tidak hanya dihadapi santri, tapi juga kyai. Kyai yang memiliki kharisma karena pengetahuannya yang luas semakin terpinggirkan oleh dunia ilmu pengetahuan modern. Kyai tidak lagi menjadi sumber referensi utama berbagai persoalan. Padahal dahulu kyai tak hanya menjadi tempat bertanya untuk persoalan agama, tapi juga untuk urusan pemerintahan, pertanian atau persoalan-persoalan yang lain. Kyai mengalami penyempitan peran dalam dunia ilmu pengetahuan, hanya menjadi rujukan untuk masalah-masalah agama saja. Di luar persoalan tekanan dari pihak eksternal, terdapat dua faktor utama yaitu lemahnya kemampuan ekonomi kyai dan kegagalan regenerasi.⁴¹

Sumber ekonomi pesantren dan kyai adalah sokongan yang diterima dari para santri yang menuntut ilmu. Karena itu semakin banyak santri yang datang ke suatu pesantren, maka semakin besar juga sumber ekonomi yang didapat oleh kyai dan keluarganya. Akibat dari semakin tidak menariknya pesantren sebagai sumber mencari ilmu, maka menurunlah jumlah santri yang berakibat pada penurunan pendapatan kyai. Karena itulah kemudian muncul pragmatisme politik di mana kyai yang merasa memiliki massa mengalami pergeseran peran lagi dari *Cultural Broker* menjadi *Political Broker*. Kyai yang memiliki keterdesakan ekonomi berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan "menjual" ummat yang diklaim berada di belakangnya. Sementara daya tawar politik mereka terhadap politisi atau partai politik begitu lemah.

Para kyai menyadari lemahnya posisi mereka. Mereka bahkan mengibaratkan posisi mereka sebagai “janur kuning” dalam hajatan. Dicari dan dipakai untuk menandai kemegahan sebuah acara, namun dibuang dan tidak diperhatikan begitu acara selesai. Kyai dipakai untuk melegitimasi kelompok politik tertentu, namun kemudian dilupakan setelah perhelatan politik usai.⁴²

Faktor internal lain adalah tidak berjalannya di tubuh pesantren atau di keluarga kyai. Sebagai contoh di pesantren Al-Khaeriyah yang memutuskan untuk menjadikan pondok pesantren Al-Khaeriyah sebagai intitusi milik publik dan bukan milik keturunan K.H. Sjam’un. Akibatnya tak ada proses penyiapan khusus untuk memegang pucuk pimpinan di Al-Khaeriyah bagi keturunan K.H. Sjam’un.⁴³

Hal ini berhubungan juga dengan institusionalisasi pesantren. Di masa lalu, pesantren amat identik dengan kyai. Santri berguru kepada kyai, bukan ke pesantren. Berbeda dengan sekarang di mana pesantren memiliki kurikulum tetap, yang bisa dijalankan oleh para pengajar (ustadz), tidak tergantung oleh figur kyai. Alhasil ketika tidak ada mekanisme penyiapan calon pengganti kyai, maka biasanya pesantren tersebut mengalami penurunan nilai di mata masyarakat.

Hal inilah yang secara kultural membedakan pesantren di Banten dengan pesantren di Jawa Timur atau Madura. Di sana, menjadi anak kyai merupakan simbol status sendiri yang memiliki gelar yaitu Gus (Jawa Timur) maupun Rah (Kependekan Lorah di Madura). Sebagai contoh, pondok pesantren Tebu Ireng Jombang yang tampuk pimpinannya selalu dilanjutkan oleh anak keturunan K.H. Hasjim Asy’ari yang bergelar Gus. Gelar Gus ini yang membedakan antara anak biologis kyai yang memberi hak memimpin pesantren dengan mereka yang “sekedar” anak didik sang kyai.

Berbagai faktor inilah yang membuat kyai mengalami penurunan peran, baik secara sosial maupun secara politik. Sebagai perbandingan kita bisa mengambil masyarakat yang memiliki kemiripan kultur yaitu Madura.⁴⁴ Di Madura, kyai tak mengalami tekanan besar seperti halnya rezim Orde Baru menekan kyai. Blater, jawaranya Madura juga tak dibesarkan sebagai anak kesayangan rezim Orde Baru. Akibatnya, setelah Orde Baru tumbang dan berbagai aktor lokal bermunculan, kyai menjadi aktor yang paling penting dengan Blater sebagai pendamping.

Di Madura, kyai tak hanya menjadi figuran namun mampu muncul sebagai aktor utama. Di semua Kabupaten di Madura—kecuali

Sampang, semua jabatan Bupati dijabat oleh kyai. Sebagai contoh, di Bangkalan, kompetisi untuk memperebutkan posisi Bupati terjadi di antara kyai dan anak kyai yang bergelar Lorah. Gelar kyai, apalagi keturunan ulama terkemuka Kyai Kholil dari Bangkalan merupakan aset politik yang paling penting di Madura.⁴⁵

Di Banten, hal yang sebaliknya terjadi. Kyai yang di era kolonial dan revolusi menjadi pemimpin masyarakat gagal menjadi aktor utama dalam politik di era selanjutnya. Pada akhirnya tak berlebihan jika posisi kyai dalam politik lokal di Banten sekarang tak lagi menjadi *cultural broker* seperti dinyatakan oleh Geertz, yang berfungsi sebagai penghubung antara negara modern dengan masyarakat tradisional atau sebagai kreator perubahan sosial sebagaimana di era revolusi namun telah bertransformasi menjadi apa yang disebut Kuntowijoyo⁴⁶ sebagai *political broker*.

Bahkan sebagai *political broker*, posisi kyai di Banten tak lagi menjadi broker besar yang mampu menyediakan imbal hasil besar berupa dukungan politik sebagai ganti bagi pemberian materiil dari politisi. Kyai di banten hanya dipandang sebagai broker politik kecil yang dipandang sebelah mata karena kharisma sebagai modal utamanya semakin menurun.

Di mata masyarakat, kyai yang berpolitik tak lagi bisa menjadi panutan yang bisa diikuti, sedangkan di mata politisi menjadikan kyai sebagai sumber dukungan tak lagi menjanjikan hasil yang memuaskan. Di mata kyai-pun, mendapatkan materiil dalam politik praktis tak lebih sebagai kesadaran perannya sebagai “janur kuning” yang dibutuhkan menghias sebuah perhelatan, tidak lebih, tidak kurang.

Catatan akhir:

¹ BPS, *Banten Dalam Angka* 2007

² Martin von Bruinessen, “Shari’a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanate of Banten,” *Archipelago Journal*, 1995: 165-200

³ *Djawab* merupakan sebutan untuk jamaah haji yang berasal dari berbagai tempat di nusantara.

⁴ Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), h. 153

⁵ Michael C. Williams, *Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*, (Jakarta: Syarikat, 2003), h. 274

⁶ Suharto, *Banten Masa Revolusi 1945-1949: Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), h. 86-87

⁷ Kabupaten Serang bisa dikatakan pusat dari dinamika politik di Banten, sejak sebelum era kolonial sampai era reformasi, karena itu deskripsi tentang penguasaan kyai oleh Golkar dan dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilu di era Orde Baru cukup berpengaruh dan menggambarkan situasi politik di Banten secara umum.

⁸ Sudiarti Artati, *Perubahan Peran Ulama di Serang*, Skripsi, (Jakarta: FISIP UI, 1988), h. 45

⁹ Sudiarti Artati, *Perubahan Peran Ulama di Serang*, h. 47

¹⁰ Wawancara dengan Aman Sukarso, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, pada tanggal 6 Agustus 2008, Ia terlibat secara intensif dalam rapat-rapat Golkar memenangkan pemilu 1978 termasuk pendirian Satkar Ulama ketika ia menjabat sebagai Camat.

¹¹ Sudiarti Artati, *Perubahan Peran Ulama di Serang*, h. 52

¹² Hal ini diakui oleh Kyai Mahmudi, bantuan materi dari Golkar di era Orde Baru jauh lebih baik dibandingkan partai politik manapun, terutama partai Islam baik di era Orde Baru maupun sekarang. Ia selama sepuluh tahun menjabat Koordinator Kecamatan Golkar di era Orde Baru. Wawancara pada tanggal 22 Agustus 2008.

¹³ Mohamad Hudaeri, dkk., *Studi Tentang Kharisma Kyai dan Jawara di Banten*, Laporan Hasil Penelitian Kompetitif 2002 Departemen Agama R.I., h. 71

¹⁴ Murtadho Dimiyati, *Manakib Abuya Cidahu: dalam Pesona Langkah di Dua Alam*, (Pandeglang: NP, 2008), h. 192-198

¹⁵ Mathla'ul Anwar merupakan organisasi Islam yang banyak mengalami dinamika politik sejak berdirinya. MA didirikan pada 1916 di Menes, Banten oleh sejumlah kyai lokal seperti K.H. TB. Muhammad Soleh, Kyai Entol Muhammad Yasin, dan Kyai Mas Abdurrahman. Kyai Entol Muhammad Yassin adalah pemimpin pertama Mathla'ul Anwar. MA, sejak kelahirannya fokus pada dua bidang, yakni dakwah Islam dan membangun pendidikan berdasarkan sistem madrasah. Pada tahun 1936, terdapat lebih dari 40 Madrasah yang berafiliasi kepada MA.

¹⁶ Dindin Nurul Rosidin, "Quo Vadis Mathla'ul Anwar," makalah yang disampaikan pada Rakernas Mathla'ul Anwar di Batam, 2007.

¹⁷ Irsjad Djuwaeli, *Membawa Mathla'ul Anwar Ke Abad XXI*, (Jakarta: PB. Mathla'ul Anwar, 1996), h. 31

¹⁸ Perwira berpangkat terakhir Letnan Jenderal, pernah memiliki beberapa jabatan penting seperti Sekretaris Negara, Menteri Agama (1978-1983) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (1983-1988). Setelah meninggal, posisi Alamsyah Ratuperwiranegara sebagai Dewan Pembina Mathlaul Anwar digantikan oleh Jenderal (Purn) R. Hartono.

¹⁹ "Panglima Front Hizbullah Tewas Diberondong," *KOMPAS*, Rabu 26 Juli 2000.

²⁰ Karikatur itu berupa gambar bayi telanjang berkepala Abdurrahman Wahid. Massa NU merasa itu adalah penghinaan karena selain seorang Presiden, Abdurrahman Wahid juga seorang kyai.

²¹ Wawancara dengan Abdul Malik, 5 Desember 2008. Sewaktu peristiwa itu terjadi, ia menjabat sebagai Redaktur Pelaksana Harian Banten.

²² Khatib Mansur, *Profil Haji Tubagus Chasan Sohib Beserta Komentar 100 Tokoh Masyarakat Seputar Pendekar Banten*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Antara Utama, 2000), h. 127

²³ Dominasi jawara dalam proses pembentukan Provinsi Banten sampai pemilihan Gubernur tahun 2001 dapat dibaca dalam Abdul Hamid, *Peran Jawara Kelompok Rawu dalam kemenangan Pasangan Djoko-Atut Sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Banten Periode 2001-2006*, Skripsi, (Jakarta: Fisip UI).

²⁴ Wawancara dengan Kyai Salman Al Faris, Wakil Ketua Satkar Ulama Indonesia. Ia dan pesantrennya mendapatkan bantuan dari Chasan Sohib, seperti tanah untuk Perguruan Islam Achmad Khatib di Jawilan (Radar Banten, 28 Agustus 2006). Menariknya, masjid di pesantren tersebut bernama Mesjid "Salman AlSohib". Wawancara Tanggal 12 Agustus 2008.

²⁵ "Pengakuan 35 Menit yang Menguncang," *Pikiran Rakyat*, 27 April 2004.

²⁶ "Jelang Pilkada Situasi Pandeglang Memanas," *Suara Karya*, 25 Agustus 2005

²⁷ Rahmatullah, "Peran Kyai dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang," *Makalah dalam Seminar Nasional Mahasiswa Pascasarjana di UGM*, 2008.

²⁸ Rahmatullah, *Peran Kyai dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang*

²⁹ Wawancara dengan Fatah Sulaeman, Ketua Harian FSPP Banten, 8 Agustus 2008, dan Kyai Mahmudi, Mantan Ketua FSPP Kabupaten Serang, sekarang menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Serang, 22 Agustus 2008. Hal ini dibenarkan oleh La Ode Asrarudin, anggota DPRD Banten dari Golkar yang menyatakan bahwa itulah hukuman bagi FSPP. Namun ada rencana bantuan keuangan pesantren melalui FSPP akan diberikan kembali. Wawancara tanggal 15 Juni 2009.

³⁰ Wawancara La Ode Asrarudin, 12 Juni 2009.

³¹ Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), h. 105

³² Wawancara konfidensial dengan EAH, calon anggota DPD dalam Pemilu 2004, 1 Agustus 2008.

³³ Wawancara dengan Muchtar Mandala, 16 Juni 2009.

³⁴ "Nu Penting Amplop Aya Duitna," *KOMPAS*, 23 Agustus 2004

³⁵ Wawancara Konfidensial dengan MTG Kepala Dinas X di Provinsi Banten, 8 Desember 2008

³⁶ Wawancara dengan K.H. Mahmudi, 22 Agustus 2008

³⁷ Wawancara dengan Fitron, pengurus DPW PKS Banten, 16 Juni 2009.

³⁸ Wawancara dengan La Ode, 12 Juni 2009

³⁹ Hal ini dibenarkan oleh Fitron, La Ode dan Muchtar Mandala.

⁴⁰ Wawancara dengan Kyai Mahmudi, 22 Agustus 2008

⁴¹ Kegagalan regenerasi menjadi kekhawatiran kalangan pesantren dan akademisi di Banten seperti K.H. Abdul Hakim, wawancara 4 Agustus 2008 dan Endad Musaddad, wawancara 5 Agustus 2008

⁴² Janur Kuning adalah pucuk daun kelapa berwarna kuning yang dihias begitu rupa dan digantungkan di depan rumah sebagai pertanda dan hiasan rumah yang mengadakan pesta perkawinan. Wawancara dengan K.H. Mahmudi, 22 Agustus 2008

⁴³ Wawancara dengan K.H. Hikmatullah Sjam'un, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khaeriyah, 1 Agustus 2008.

⁴⁴ Madura memiliki kemiripan kultur dengan Banten dalam jumlah pemeluk agama Islam yang dominan, ketaatan beragama dan fanatisme terhadap kyai. Selain kyai yang merupakan pemimpin informal, Blater atau jago juga merupakan salah satu elit kultural. Blater sebagaimana Jawara di Banten memiliki kedigjayaan yang didapatkannya dari kyai.

⁴⁵ Observasi terbatas di Madura, Juli 2008.

⁴⁵ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid*, (Bandung: Mizan, 2001)

DAFTAR PUSTAKA

- Artati, Sudiarti, *Perubahan Peran Ulama di Serang*, Skripsi, Jakarta: FISIP UI, 1988
- BPS. *Banten Dalam Angka*, 2007
- Bruinessen, Martin van and Farid Wajidi, *Syu'un Ijtima'iyah and the Kyai Rakyat: Traditionalist Islam, Civil Society and Sosial Concerns*, 2003
- Dhofier, Zamarkhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Dimiyati, Murtadho, *Manakib Abuya Cidahu dalam Pesona Langkah di Dua Alam*, Pandeglang: NP, 2008
- Djajadiningrat, Hossein, *Tinjauan kritis tentang Sajarab Banten, Sumbangan bagi Pengenalan Sumber-sumber Penulisan Sejarah*, Jakarta: Penerbit Obor, 1983
- Djuwaeli, Irsjad, *Membawa Mathla'ul Anwar ke Abad XXI*, Jakarta: PB. Mathla'ul Anwar, 1996
- Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987
- Hudaeri, Mohamad, dkk., *Studi Tentang Kharisma Kyai dan Jawara di Banten*, Laporan Hasil Penelitian Kompetitif 2002 Departemen Agama.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid*, Bandung: Mizan, 2001

-
- Mansur, Khatib, *Profil Haji Tubagus Chasan Sochib Beserta Komentar 100 Tokoh Masyarakat Seputar Pendekar Banten*, Jakarta: Penerbit Pustaka Antara Utama, 2000
- Rahmatullah, "Peran Kyai dalam Pilkada Kabupaten Pandeglang," *Makalah dalam Seminar Nasional Mahasiswa Pascasarjana di UGM*, 2008
- Rosidin, Dindin Nurul, "Quo Vadis Mathla'ul Anwar," *Makalah yang disampaikan pada Rakernas Mathla'ul Anwar di Batam*, 2007
- Suharto, *Banten masa Revolusi, 1945-1949. Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001
- Tihami, M.A., *Kyai dan Jawara di Banten, Studi tentang Agama, Magi, dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang, Banten*, tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992
- von Bruinessen, Martin, "Shari'a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanate of Banten," *Archipelago Journal*: 165-200, 1995
- Williams, Michael C., *Arit dan Bulan Sabit Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*, Jakarta: Penerbit Syarikat, 2003

Koran

- "Panglima Front Hizbullah Tewas Diberondong, *KOMPAS* 26 Juli 2000
- "Nu Penting Amplop Aya Duitna, *KOMPAS*, 23 Agustus 2004
- "Pengakuan 35 Menit yang Mengguncang," *Pikiran Rakyat*, 27 April 2004
- "Jelang Pilkada, Situasi Pandeglang Memanas," *Suara Karya*, 25 Agustus 2005